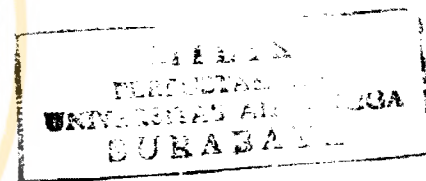


**KETEPATAN PENGGUNAAN ANALISIS LAPORAN
KEUANGAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN PPh
PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN DI KPP GRESIK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



Diajukan Oleh :

**SUGENG WAHONO
049923008 E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

SKRIPSI

**KETEPATAN PENGGUNAAN ANALISIS LAPORAN
KEUANGAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN PPh
PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN DI KPP GRESIK**

Diajukan Oleh :

SUGENG WAHONO

049923008 – E

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing,



Drs. Heru Tjaraka, Msi., Ak
NIP 132054304

Tanggal 30-11-2001

Ketua Jurusan Akuntansi – Ekstensi



Dr. Arsono Laksmna, SE., Ak
NIP 130783542

Tanggal.....

INTISARI

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pembayaran dimuka PPh atau angsuran PPh setiap bulan. Walaupun sebagai pembayaran pendahuluan namun besarnya PPh 25 tersebut harus dihitung berdasarkan perhitungan tersendiri yaitu berdasarkan SPT Tahunan tahun yang lalu atau berdasarkan hal – hal tertentu, sehingga jumlah PPh 25 tersebut merupakan PPh yang terutang kepada Wajib Pajak yang harus dibayar setiap bulan. Apabila jumlah tersebut tidak dilunasi maka akan dikenai sanksi 2% perbulan. Setelah tiga bulan atau lebih berlalunya tahun pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan jumlah PPh Pasal 25, apabila jumlah PPh yang akan terutang untuk tahun tersebut kurang dari 75% dari dasar penghitungan PPh Pasal 25, dengan mengajukan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dan melampirkan jumlah perkiraan laporan keuangan tahun tersebut dan jumlah realisasi laporan keuangan sampai dengan sebelum bulan pengajuan. Dengan adanya permohonan tersebut KPP melakukan analisis atas perkiraan penghasilan kena pajak yang diajukan oleh WP sebagai dasar perkiraan PPh yang akan terutang untuk pemberian pengurangan PPh Pasal 25.

Permasalahan yang diangkat adalah seberapa besar ketepatan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan untuk menentukan jumlah perkiraan penghasilan kena pajak, dan membandingkan ketepatan tersebut apabila analisis yang digunakan berdasarkan realisasi penghasilan kena pajak sampai dengan sebelum bulan pengajuan tanpa melihat perkiraan penghasilan kena pajak yang diajukan Wajib Pajak.

Ketepatan disini diartikan bahwa perkiraan penghasilan kena pajak dari hasil analisis dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun dalam SPT Tahunan PPh dan merupakan variabel dependen. Sedangkan variabel independen adalah perkiraan penghasilan kena pajak dari hasil analisis yang dilakukan ataupun perkiraan penghasilan kena pajak apabila didasarkan realisasinya sampai dengan sebelum bulan pengajuan, dan realisasi penghasilan kena pajak akhir tahun.

Dalam penelitian ini, dilakukan atas WP Badan di KPP Gresik dan tidak menggunakan sampel tetapi meneliti seluruh populasi, yang terdiri dari 19 Wajib Pajak pada tahun 1998, 1999, dan tahun 2000. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata perkiraan penghasilan kena pajak dari hasil analisis yang dilakukan sebesar 78,62% dibanding realisasinya, yang berarti rata – rata 21,38% dibawah realisasinya. Apabila perkiraan penghasilan kena pajak tersebut didasarkan dari jumlah realisasinya sampai dengan sebelum bulan pengajuan tanpa melihat perkiraan yang diajukan WP, maka jumlah perkiraan penghasilan kena pajak tersebut rata - rata sebesar 80,67% dari realisasinya pada akhir tahun, yang menunjukkan bahwa lebih tepat 2,05% dari pada analisis untuk menentukan jumlah perkiraan penghasilan kena pajak yang selama ini telah dilakukan.